

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem pemerintahan demokratis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara.¹ Dalam kerangka tersebut, media massa, khususnya surat kabar memegang peranan sentral dalam menjamin keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Surat kabar tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian berita, tetapi juga berperan sebagai alat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, serta menjadi ruang publik untuk membentuk dan menyuarakan opini masyarakat secara bebas dan bertanggung jawab.² Peran ini menegaskan pentingnya kebebasan pers sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi yang sehat.

Surat kabar, yang menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) didefinisikan sebagai “lembaran kertas yang berisi kabar atau berita dan sebagainya, biasanya disusun dalam kolom-kolom, dicetak, dan diterbitkan secara berkala,” merupakan salah satu bentuk media massa yang memiliki peran vital dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.³ Keberadaan surat kabar tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, pendidikan politik, serta medium dalam membentuk opini publik dalam masyarakat demokratis.

Lazarsfeld, L.W. Doob, dan Bernard Berelson dalam studi mereka pada tahun 1950 menyatakan bahwa surat kabar memberikan kebebasan bagi pembaca untuk memilih informasi sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Selain itu, surat kabar memungkinkan pembaca untuk mengakses informasi tersebut secara berulang kali tanpa dibatasi oleh waktu atau momen penyiaran seperti halnya

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28F.

² Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, 245–246.

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. V (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 1246.

media elektronik.⁴ Hal ini menjadikan surat kabar sebagai media yang fleksibel dalam menyampaikan informasi, serta memberi ruang bagi proses refleksi dan interpretasi yang lebih mendalam oleh pembacanya.

Surat kabar merupakan salah satu bentuk media massa yang memiliki peranan signifikan dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap kinerja lembaga pemerintahan.⁵ Sebagai media cetak, surat kabar memiliki keunggulan dalam menyampaikan berita secara mendalam, menyediakan ruang bagi analisis yang argumentatif, serta membuka diskusi publik mengenai isu-isu politik, sosial, dan ekonomi.

Dalam konteks sistem demokrasi, surat kabar dipandang sebagai bagian dari pilar keempat (*fourth estate*) yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekuasaan⁶ Dengan menyuarakan kepentingan masyarakat, mengkritisi kebijakan yang menyimpang, dan menyediakan informasi yang akurat dan berimbang, surat kabar berperan penting dalam memperkuat partisipasi publik serta menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dan rakyat.

Sebelum era Reformasi 1998, kebebasan pers di Indonesia sangat dibatasi oleh rezim Orde Baru yang otoriter. Pada masa tersebut, media massa lebih difungsikan sebagai alat legitimasi kekuasaan negara ketimbang sebagai pilar demokrasi yang independen. Pemerintah menerapkan berbagai bentuk kontrol terhadap media, salah satunya melalui kewajiban kepemilikan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP),⁷ yang menjadi instrumen untuk membatasi ruang gerak

⁴ Paul F. Lazarsfeld, L.W. Doob, dan Bernard Berelson, *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign* (New York: Columbia University Press, 1950), 38–40.

⁵ Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, 6th ed. (London: Sage Publications, 2010), 183–185.

⁶ Oey-Gardiner, Mayling. *Demokrasi dan Media di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 31.

⁷ Sistem Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) merupakan mekanisme perizinan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru, sebagai bentuk kontrol negara terhadap aktivitas penerbitan pers. SIUPP menjadi syarat mutlak bagi setiap perusahaan untuk dapat menjalankan aktivitas jurnalistik secara legal. Kebijakan ini sering kali dipandang sebagai alat pembungkaman terhadap kebebasan pers, karena pemerintah memiliki kewenangan

pers.⁸ Media yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik pemerintah kerap kali dibekukan atau dicabut izinnnya secara sepihak.

Situasi ini menciptakan iklim ketakutan dan sensor diri di kalangan jurnalis dan penerbit, yang pada akhirnya menghambat kebebasan berekspresi dan akses masyarakat terhadap informasi yang objektif dan kritis.⁹ Ketertundukan media terhadap negara menjadikan pers kehilangan fungsinya sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*)¹⁰ dan pengawal demokrasi, hingga akhirnya perubahan besar mulai terjadi pascareformasi.

Namun, menjelang akhir kekuasaan Orde Baru, desakan masyarakat terhadap perubahan politik dan kebebasan sipil semakin menguat. Tuntutan terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi menjadi bagian dari agenda utama gerakan reformasi. Ketika Presiden Soeharto lengser pada Mei 1998, Indonesia memasuki era transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka. Dalam konteks ini, kebebasan pers mulai dihargai dan dijamin secara hukum, salah satunya melalui pengesahan



untuk mencabut SIUPP sewaktu-waktu terhadap media yang melanggar ketentuan atau membatasi penguasa secara tajam. Praktik ini menunjukkan bahwa SIUPP lebih banyak berfungsi sebagai instrumen represif daripada administratif, hingga akhirnya sistem ini dihapuskan pascareformasi melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan bahwa kebebasan pers tidak lagi diperlukan.

⁸ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia* (Jakarta: Equinox Publishing, 2006), 112–114.

⁹ Krishna Sen dan David T. Hill, *Media, Culture and Politics in Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 65–66.

¹⁰ Dalam konteks jurnalisme, media memiliki peran penting sebagai *watchdog* atau anjing penjaga kekuasaan. Fungsi ini menjadikan media sebagai pengawas yang kritis terhadap jalannya pemerintahan dan praktik politik, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Sebagai *watchdog*, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengawasi kebijakan publik, membongkar praktik korupsi, serta menjaga agar proses demokrasi berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999¹¹ tentang Pers, yang menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah bagian dari hak asasi manusia.¹²

Reformasi ini membawa angin segar bagi dunia pers nasional. Media massa, yang sebelumnya dikekang oleh otoritarianisme, kini memiliki ruang yang lebih luas untuk menjalankan fungsi informatif, edukatif, kontrol sosial, dan advokasi secara independen.¹³ Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari sistem pemerintahan yang represif menuju demokrasi yang menghargai transparansi dan akuntabilitas, di mana media menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat partisipasi publik dan mengawal jalannya pemerintahan.

Namun demikian, meskipun telah terjadi banyak kemajuan, kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Intervensi politik, tekanan dari aktor ekonomi, dan kekerasan terhadap jurnalis masih menjadi hambatan struktural yang perlu diatasi agar media dapat menjalankan perannya secara bebas dan bertanggung jawab dalam sistem demokrasi.¹⁴

Pasca-reformasi, surat kabar mulai tumbuh secara pesat dan lebih beragam dalam menyuarakan opini. Media cetak memberikan ruang bagi munculnya berbagai perspektif politik, agama, budaya, dan sosial yang sebelumnya disingkirkan atau dibungkam oleh negara.¹⁵ Perkembangan ini mencerminkan semangat demokrasi, di mana surat kabar tidak hanya menjalankan fungsi penyebaran informasi, tetapi juga menjadi wahana ekspresi aspirasi rakyat serta forum diskusi publik yang inklusif.

¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan sebagai bagian dari hukum pasca-Orde Baru, yang bertujuan menjamin kemerdekaan pers di Indonesia. UU ini menghapus sistem perizinan seperti SIUPP dan menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dalam pasal-pasal lainnya, undang-undang ini menekankan bahwa pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi. Selain itu, UU Pers 1999 menjamin hak tolak wartawan, kebebasan sensor dan pelarangan penyiaran, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dengan hadirnya regulasi ini, pers Indonesia memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi secara bebas dan bertanggung jawab di tengah masyarakat demokratis.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 2.

¹³ Krishna Sen dan David T. Hill, 85–87.

¹⁴ Andreas Harsono, *Agama Saya Adalah Jurnalisisme* (Jakarta: Yayasan Pantau, 2010), 142–145.

¹⁵ Krishna Sen dan David T. Hill, 93–95.

Pasca-Reformasi, media massa memainkan peran krusial dalam proses demokratisasi di Indonesia. Surat kabar seperti *Pikiran Rakyat* dan *Hikmah* tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai jembatan antara masyarakat dan pengambil kebijakan.¹⁶ Melalui pemberitaan yang lebih terbuka dan beragam, media cetak turut membangun kesadaran politik masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik, terutama dalam momentum penting seperti Pemilu 1999. Peran ini memperlihatkan bahwa pers menjadi medium penting dalam membentuk opini publik dan memperkuat keterlibatan warga negara dalam demokrasi.

Namun demikian, surat kabar juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjaga independensi editorial di tengah tekanan ekonomi dan politik. Ketergantungan pada iklan, persaingan bisnis yang ketat, serta penetrasi pemilik media ke dalam arena politik sering kali menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan.¹⁷ Oleh karena itu, meskipun reformasi telah membuka ruang kebebasan pers, keberlanjutan kualitas demokrasi tetap memerlukan pers yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab.

Pemilu 1999 merupakan pemilihan umum pertama yang diselenggarakan setelah tumbang rezim Orde Baru, sekaligus menjadi tonggak awal era Reformasi dan peralihan menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka di Indonesia. Pemilu ini memperkenalkan sistem multipartai secara lebih luas, di mana sebanyak 48 partai politik terdaftar sebagai peserta, suatu kemajuan signifikan dibandingkan masa Orde Baru yang hanya mengakomodasi tiga partai resmi.¹⁸ Kesempatan ini membuka ruang bagi berbagai kelompok politik, baik lama maupun baru, untuk berpartisipasi secara lebih bebas dan setara dalam kontestasi elektoral.

Namun demikian, pelaksanaan Pemilu 1999 tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan kultural. Transisi dari pemerintahan otoriter ke sistem

¹⁶ Dadan Wildan Hidayat, *Pers, Politik, dan Pemilu: Dinamika Media dalam Demokrasi Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 112–113.

¹⁷ Mayling Oey-Gardiner 89–91.

¹⁸ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia, 2003), 453.

demokrasi yang kompetitif dihadapkan pada minimnya pemahaman masyarakat terhadap proses politik yang kompleks. Rendahnya literasi politik, kerumitan akibat banyaknya partai, serta ketidakpercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu menjadi hambatan awal dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi di kalangan pemilih.¹⁹ Meskipun begitu, pemilu ini tetap menjadi langkah penting dalam membangun fondasi demokrasi Indonesia pasca-Orde Baru.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbandingan peran dua surat kabar dalam pemberitaan Pemilu 1999, yakni *Pikiran Rakyat* dan *Hikmah*. Pemilu 1999 merupakan titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia karena menjadi pemilu demokratis pertama setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa ini menandai transisi dari sistem politik otoriter menuju sistem multipartai yang lebih terbuka, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam konteks perubahan tersebut, media cetak memegang peran krusial sebagai sarana penyebaran informasi sekaligus sebagai penghubung antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Surat kabar seperti *Pikiran Rakyat* dan *Hikmah* tampil sebagai aktor penting dalam proses demokratisasi, dengan memberikan pemberitaan yang lebih terbuka, beragam, dan reflektif terhadap situasi politik saat itu. Pemberitaan yang disampaikan kedua media ini turut membentuk kesadaran politik publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu, yang sebelumnya sangat terbatas selama era Orde Baru.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana media berperan dalam membentuk opini publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi. Peran media menjadi sangat strategis, terutama dalam masa transisi politik ketika masyarakat membutuhkan informasi yang akurat, seimbang, dan mendidik untuk memahami sistem politik yang baru tumbuh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Gambaran Pemilu Tahun 1999 dalam Pemberitaan**

¹⁹ Saiful Mujani, “Pemilu 1999: Legitimasi Demokratis dan Perilaku Pemilih,” dalam *Pemilu Demokratis: Pandangan dan Harapan*, ed. Ramlan Surbakti (Jakarta: Perludem, 2000), 67–69.

Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Tabloid Hikmah". Tahun 1999 dipilih secara spesifik karena merupakan momen penting dalam sejarah politik Indonesia, yakni pelaksanaan pemilu demokratis pertama setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Penelitian ini membatasi pembahasan pemberitaan Pemilu 1999 pada periode April hingga Juni 1999. Batasan ini dipilih karena pada rentang waktu tersebut terdapat rangkaian peristiwa politik yang paling menentukan: masa kampanye, puncak kampanye, hingga pelaksanaan pemungutan suara dan publikasi hasil *quick count*.²⁰

Pemilu ini menjadi titik awal beroperasinya sistem multipartai secara terbuka dan meluas, di mana media massa, khususnya surat kabar, memainkan peran krusial dalam memberikan informasi kepada publik, membentuk opini politik, dan memediasi hubungan antara warga negara dengan institusi politik. Dengan demikian, melalui kajian terhadap pemberitaan dua media cetak yang mewakili pendekatan jurnalistik berbeda Pikiran Rakyat sebagai media umum daerah dan Hikmah sebagai media mingguan Islam, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap bagaimana konstruksi wacana politik dalam media turut membentuk dinamika demokrasi pada masa awal Reformasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam latarbelakang, maka penulis merumuskan permasalahan yang akandibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Tabloid Hikmah?
2. Bagaimana perbandingan Pemberitaan Pemilu 1999 dalam Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Tabloid Hikmah?

²⁰ Quick count atau hitung cepat adalah metode penghitungan suara berdasarkan sampel tempat pemungutan suara (TPS) yang dipilih secara acak dan representatif. Mekanisme ini dilakukan oleh lembaga survei independen dengan tujuan mempercepat informasi hasil pemilu, bahkan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis hasil resmi. Prinsip dasar quick count adalah penggunaan metode ilmiah statistik, khususnya multistage random sampling, sehingga hasilnya memiliki tingkat akurasi tinggi dengan margin of error tertentu.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan fakta yang berkaitan dengan masalah yang telah ditemukan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan sejarah Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Tabloid Hikmah
2. Untuk menjelaskan perbandingan pemberitaan Pemilu 1999 dalam Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Tabloid Hikmah

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian mengenai Pemilu Indonesia Tahun 1999 dalam Pemberitaan Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Hikmah, tidak begitu saja disusun tanpa adanya sumber informasi sebagai media pendukung dalam melakukan penelitian ini. Adapun sumber-sumber yang dirasa jelas untuk dijadikan sebagai rujukan penelitian, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Karisma Aditya, (2019), "*Penggunaan Surat Kabar Suara Merdeka Sebagai Media Komunikasi Politik Pada Pemilu 1999*"

Penelitian yang dilakukan oleh Karisma Aditya berupaya mengkaji bagaimana surat kabar Suara Merdeka dimanfaatkan sebagai alat komunikasi politik, khususnya melalui penyajian iklan politik dan strategi kampanye pada masa pasca-Reformasi. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada analisis pengaruh iklan politik terhadap perolehan suara partai-partai politik di wilayah Jawa Tengah. Dalam konteks tersebut, Karisma menekankan adanya perubahan signifikan yang terjadi dalam lanskap komunikasi politik seiring dengan terbukanya kebebasan pers pada masa Reformasi, yang memungkinkan media massa memainkan peran yang lebih dinamis dalam kontestasi politik.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, fokus utama kajian ini adalah pada konstruksi pemberitaan dalam dua surat kabar lokal, yakni Pikiran Rakyat dan Tabloid Hikmah, dalam mengangkat isu-isu seputar Pemilu 1999. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek

komunikasi politik secara pragmatis seperti iklan, tetapi juga menelaah bagaimana kedua media tersebut mengonstruksi wacana politik dan demokrasi, serta bagaimana pandangan ideologis dan nilai-nilai yang diusung oleh masing-masing surat kabar tercermin dalam pemberitaan mereka. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada dimensi naratif, ideologis, dan kultural, serta kontribusi media dalam pembentukan kesadaran politik publik pada masa transisi demokrasi di Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Santi Novia Dewi, (2011), *“Persaingan Pemberitaan Surat Kabar Dalam Kampanye Pemilihan Umum 1955: Kasus Suluh Indonesia, Harian Rakjat Dan Abad”*

Skripsi yang ditulis oleh Santi Novia Dewi memusatkan kajian pada Pemilu 1955, yakni pemilu pertama yang diselenggarakan secara demokratis di Indonesia setelah kemerdekaan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dalam menganalisis bagaimana surat kabar yang berafiliasi dengan partai politik, seperti Suluh Indonesia (partai PNI), Harian Rakjat (PKI), dan Abadi (Masyumi), dimanfaatkan sebagai alat kampanye politik. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada persaingan antar media yang berafiliasi secara ideologis dengan partai politik tertentu, serta bagaimana narasi yang dibentuk dalam surat kabar tersebut memengaruhi jalannya kampanye politik dan opini publik.

Berbeda dengan penelitian tersebut, studi yang dilakukan oleh penulis berfokus pada Pemilu 1999, sebagai pemilu pertama pasca-Orde Baru dalam era Reformasi. Penelitian ini tidak menyoroti surat kabar partai, melainkan dua surat kabar lokal yang memiliki orientasi editorial yang berbeda: Pikiran Rakyat dan Hikmah. Fokusnya terletak pada bagaimana kedua media ini mengonstruksi pemberitaan terkait Pemilu 1999, serta sejauh mana masing-masing surat kabar tersebut mencerminkan dinamika politik, partisipasi publik, dan perubahan budaya demokrasi dalam masa transisi. Penelitian ini lebih mengedepankan analisis framing dan pendekatan wacana, alih-alih hanya melihat fungsi media sebagai alat propaganda politik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Andik Yuliyanto (1999) berjudul *Analisis Wacana Politik: Kajian Kampanye Partai Amanat Nasional pada Pemilu Tahun 1999 di Surabaya*”

Skripsi yang ditulis oleh Andik Yuliyanto menitikberatkan pada aspek linguistik dan pragmatik dalam strategi komunikasi politik. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan analisis wacana untuk mengkaji bagaimana pesan-pesan politik disampaikan oleh aktor kampanye secara verbal dalam konteks kampanye terbuka Partai Amanat Nasional (PAN). Andik menelusuri struktur retorik, prinsip kerjasama, serta bentuk tindak tutur yang digunakan dalam membangun citra politik partai dan pengaruhnya terhadap publik. Fokus penelitian ini lebih diarahkan pada bentuk dan teknik penyampaian pesan politik secara langsung dalam ruang kampanye fisik dan verbal.

Berbeda dengan itu, penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada analisis konstruksi media cetak dalam memberitakan Pemilu 1999, khususnya pada surat kabar Pikiran Rakyat dan Hikmah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan teori framing dari Robert Entman untuk melihat bagaimana dua surat kabar dengan latar ideologis yang berbeda mengonstruksi realitas politik melalui pemberitaan. Jika Andik melihat komunikasi politik dalam tataran langsung antara juru kampanye dan masyarakat, maka penelitian ini menganalisis representasi politik melalui media massa cetak sebagai saluran pembentuk opini publik dan alat kontrol demokrasi. Dengan demikian, perbedaan terletak pada medium komunikasi yang dikaji (kampanye verbal vs media cetak), pendekatan teoretis yang digunakan (analisis wacana vs framing), serta wilayah kajian (Surabaya vs media Jawa Barat).

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam proses meneliti suatu peristiwa atau fenomena masa lampau, seorang sejarawan selalu mengikuti serangkaian tahapan yang dikenal sebagai metode atau pendekatan penelitian sejarah. Metode ini menjadi pedoman sistematis dalam

mengkaji suatu kasus sejarah, mulai dari pencarian sumber hingga penyusunan narasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut sejarawan Lois Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah untuk menemukan data yang autentik dan dapat dipercaya, serta menyusun sintesis dari data tersebut menjadi kisah sejarah yang bernilai ilmiah dan objektif.²¹

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode sejarah yang bersifat kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena mampu menggali makna dan konteks dari berbagai data yang dikumpulkan secara mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²² Dengan pendekatan ini, penulis tidak hanya mengumpulkan fakta-fakta historis, tetapi juga menafsirkan dinamika sosial, politik, dan budaya yang melingkupi peristiwa yang diteliti.

Dalam praktiknya, seorang sejarawan sangat memperhatikan keandalan dan keabsahan sumber sejarah sebagai landasan utama dalam menyusun sebuah rekonstruksi masa lalu. Sebagaimana dijelaskan oleh Kuntowijoyo, penelitian sejarah terdiri atas lima tahapan utama yang harus dilakukan secara sistematis dan berurutan. Tahapan tersebut meliputi: pemilihan topik, heuristic (Pengumpulan Sumber), Verifikasi (Kritik Sejarah), Interpretasi (analisis data), dan Historiografi.²³ Melalui kelima tahapan ini, penelitian sejarah tidak hanya menyajikan rangkaian peristiwa secara kronologis, tetapi juga membangun pemahaman kritis terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam konteks waktu tertentu.

Penelitian tentang Pemilu Indonesia Tahun 1999 dalam Pemberitaan Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Hikmah, penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hal itu bertujuan

²¹ Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method* (New York: Alfred A. Knopf, 1950), 48.

²² Robert C. Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences* (New York: Wiley, 1975), 5.

²³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1997), 89–95.

untuk mendapatkan sumber-sumber yang kredible agar bisa dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini. Pengisahan masa lalu tidak akan bisa dikerjakan apabila tidak ada sumber yang menyangkut tentang peristiwa tersebut. Maka, dengan menggunakan metode penelitian sejarah, peneliti berusaha untuk mendapatkan sumber-sumber yang otentik dan dapat dituliskan menjadi karya ilmiah yang objektif.

1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah, yang berasal dari kata Yunani *heuriskein*, yang berarti “menemukan.” Dalam konteks metodologi sejarah, heuristik tidak hanya dimaknai sebagai proses pencarian sumber sejarah, tetapi juga mencakup kegiatan peneliti dalam menelusuri, mengidentifikasi, serta mengumpulkan berbagai jenis sumber, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

Menurut Sulasman, heuristik adalah proses penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber sejarah secara sistematis, dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat dan autentik sebagai dasar penyusunan narasi sejarah yang bertanggung jawab secara ilmiah. Ia menegaskan bahwa dalam proses ini, seorang peneliti dituntut untuk cermat dan kritis dalam menyeleksi sumber agar tidak terjebak pada data yang bias atau tidak valid.²⁴

Pada tahap ini, penulis melakukan pelacakan terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan pemberitaan Pemilu 1999 dalam surat kabar *Pikiran Rakyat* dan *Hikmah*. Sumber-sumber yang dimanfaatkan meliputi arsip cetak surat kabar tahun 1999 (baik yang tersedia di perpustakaan maupun dokumentasi pribadi), edisi khusus seperti *Siyasah*. Semua data ini dihimpun untuk membangun landasan yang kuat dalam tahapan verifikasi dan interpretasi selanjutnya.

²⁴ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 47.

Sumber sejarah secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda.

Pertama, sumber tertulis adalah sumber sejarah yang memuat informasi atau keterangan dalam bentuk tulisan. Sumber ini dapat berupa dokumen, arsip, prasasti, naskah kuno, surat kabar, ataupun catatan resmi lainnya yang ditulis pada media seperti kertas, batu, dinding, dan sejenisnya. Keunggulan sumber tertulis adalah kemampuannya dalam merekam data secara relatif permanen dan dapat diakses kembali dalam waktu yang lama.²⁵

Kedua, sumber lisan merupakan keterangan sejarah yang diperoleh dari kesaksian langsung pelaku atau saksi mata peristiwa sejarah. Sumber ini biasanya diperoleh melalui wawancara atau testimoni. Namun, sumber lisan memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada ingatan, persepsi, dan penafsiran subyektif dari narasumber. Oleh karena itu, validitasnya harus diuji melalui proses kritik sumber secara ketat.²⁶

Ketiga, sumber benda (artefaktual) adalah sumber yang berasal dari peninggalan fisik atau material masa lalu, seperti peralatan, senjata, pakaian, bangunan, atau benda-benda kuno lainnya yang mencerminkan peradaban dan kebudayaan suatu masyarakat pada masa tertentu. Sumber ini penting untuk memberikan konteks visual dan material dalam merekonstruksi kehidupan masa lalu.²⁷

Dengan memahami ketiga jenis sumber tersebut, seorang peneliti sejarah dapat menyusun narasi historis yang utuh dan komprehensif, dengan tetap memperhatikan prinsip validitas dan keotentikan informasi.

Dalam penulisan hasil penelitian mengenai Pemilu Indonesia Tahun 1999 dalam Pemberitaan Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Hikmah, penulis telah melakukan tahap heuristik sebagai bagian dari metode penelitian sejarah. Heuristik merupakan proses pencarian, penemuan, dan

²⁵ Kuntowijoyo, 89.

²⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 165.

²⁷ Sulasman, 51.

pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dan kredibel guna menunjang analisis serta penyusunan narasi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁸

Untuk mendapatkan sumber primer maupun sekunder yang dibutuhkan, penulis melakukan pencarian bahan pustaka dan dokumentasi ke sejumlah institusi dan lembaga informasi. Adapun tempat-tempat yang dikunjungi selama proses heuristik antara lain:

1. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Jawa Barat
3. Perpustakaan Batu Api
4. Kantor Pusat Surat Kabar Pikiran Rakyat

Melalui kunjungan dan pengumpulan data di berbagai lokasi tersebut, penulis berhasil mengidentifikasi dan memperoleh bahan-bahan sejarah yang dapat digunakan untuk mendukung kajian secara mendalam terhadap pemberitaan Pemilu 1999 dalam dua surat kabar yang menjadi objek utama penelitian ini.

1) Sumber Primer

Sumber primer merupakan jenis sumber sejarah yang berasal langsung dari masa terjadinya suatu peristiwa, dan disampaikan oleh pelaku, saksi mata, atau pihak yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung. Sumber ini memiliki nilai otentik yang tinggi karena mengandung informasi yang belum mengalami interpretasi atau penafsiran dari pihak lain.²⁹

Menurut Kuntowijoyo, sumber primer adalah “sumber yang berasal dari zaman yang bersangkutan dan merupakan hasil langsung dari aktivitas manusia pada masa itu.”³⁰ Artinya, suatu dokumen, catatan, artikel surat kabar, foto, rekaman, atau wawancara yang dibuat tepat pada saat atau

²⁸ Kuntowijoyo, 89.

²⁹ Louis Gottschalk, 58.

³⁰ Kuntowijoyo, 111.

segera setelah suatu peristiwa terjadi dapat dikategorikan sebagai sumber primer.

Dalam konteks penelitian ini, *Pikiran Rakyat* dan *Hikmah* edisi tahun 1999 dapat dikategorikan sebagai sumber primer karena kedua media tersebut meliput langsung proses dan dinamika Pemilu 1999. Informasi yang disajikan dalam kedua surat kabar itu merupakan hasil laporan, pengamatan, dan analisis dari para wartawan dan redaksi yang bekerja pada masa tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang autentik mengenai situasi politik, opini masyarakat, serta strategi komunikasi politik partai-partai saat itu.

a) Sumber Tertulis

Sumber tertulis termasuk ke dalam sumber primer pada penelitian ini, dikarenakan tulisan-tulisan yang dituangkan secara langsung dalam bentuk surat kabar atau koran dan diterbitkan secara langsung oleh *Pikiran Rakyat* dan *Hikmah*.

1. Surat Kabar *Pikiran Rakyat*, Bandung-minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 05), “Arena KAMPANYE: Sandaran Gerak Perjuangan PSII”
2. Surat Kabar *Pikiran Rakyat*, Bandung-Minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 05), “Laskat Megawati Merahkan Bandung”
3. Surat Kabar *Pikiran Rakyat*, Bandung-Minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 05), “Arena KAMPANYE: PNI Jabar Mendukung Ali Sadikin Sebagai Capres”
4. Surat Kabar *Pikiran Rakyat*, Bandung-Minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 05), “Arena KAMPANYE: PIB Berikan Kredit Tanpa Bunga Bagi Pengusaha Kecil”
5. Surat Kabar *Pikiran Rakyat*, Bandung-Minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 05), “Arena KAMPANYE: “Tanpa Bolo, Tanpa Ngesurake” Padi Perjuangkan Kedaulatan Rakyat”

6. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 57), “Sorotan PANWASLU PEMILU, 7 JUNI 1999: Masa akan Lewati Kota”
7. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 57), “Untuk Teliti Soal Kekayaan Presiden Soeharto: Jaksa Agung Cek Laporan “Time” ”
8. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 57), “Berbagai Kreativitas di Masa Kampanye”
9. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Rabu (MANIS) 26 Mei 1999, (Nomor 60), “Sorotan PANWASLU PEMILU, 7 JUNI 1999: Surat Teguran Buat PKB”
10. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Rabu (MANIS) 26 Mei 1999, (Nomor 60), “PKB Minta Kadernya Awasi TPS: Amien Jawab Gus Dur”
11. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Rabu (MANIS) 26 Mei 1999, (Nomor 60), “Jenderal TNI Subagyo: Utamakan Persatuan, Berarti Kita Semua Menagkan Pemilu”
12. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Rabu (MANIS) 26 Mei 1999, (Nomor 60), “Debat Ekonomi Parpol, Sepi Peminat”
13. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Rabu (MANIS) 26 Mei 1999, (Nomor 60), “Fachry Ali: “Selama Ini di Tangan Gus Dur” Amien Ingin Rebut Bola Poitik”
14. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (WAGE) 9 Mei 1999, (Nomor 44), “ Presiden di Pesantren Tebuireng: Semua pihak agar terima siapapun pemenang pemilu”
15. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (WAGE) 9 Mei 1999, (Nomor 44), “BJ Habibie satu-satunya Capres Partai Golkar: Larangan bagi Pejabat Kampanye agar Merata”

16. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (WAGE) 9 Mei 1999, (Nomor 44), “HARAPAN ANDA Menyongsong Pemilu 7 Juni 1999: Harapan “Orang Kecil” Tak Banyak”
17. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Rabu (KLIWON) 5 Mei 1999, (Nomor 40), “Pendaftaran Pemilih Diperpanjang Hingga 15 Mei: 42 Partai Politik Sudah Serahkan Daftar Caleg”
18. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Rabu (KLIWON) 5 Mei 1999, (Nomor 40), “PARTAI ANDA: (48) Partai Pekerja Indonesia”
19. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Rabu (KLIWON) 5 Mei 1999, (Nomor 40), “Polisi PBB Siap Amankan Pemungutan Suara: Otonomi Timtim Disepakati”
20. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Rabu (KLIWON) 5 Mei 1999, (Nomor 40), “Rencana Ini Disambut Baik Kalangan Pimpinan Partai: Sekber Humas Parpol di Redaksi PR”
21. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Rabu (KLIWON) 5 Mei 1999, (Nomor 40), “Menperindag Kirim Surat ke KPU: Kampanye Jangan Ganggu Alur Distribusi Pangan”
22. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (PAHING) 2 Mei 1999, “Tak Ada Syarat Capres Tahu Semua Masalah”
23. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (PAHING) 2 Mei 1999, (Nomor 37), “Presiden Kunjungi Pesantren Darussalam dan Suryalaya: Tak Perlu Menghindar ke LN, Saat Pemilu”
24. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (PAHING) 2 Mei 1999, (Nomor 37), DPP PPP dan DPP PKB Menyatakan Prihatin: Massa Parpol Betrok, 5 Tewas”
25. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (PAHING) 2 Mei 1999, (Nomor 37), “PARTAI ANDA: (45) Partai

Solidaritas Uni Nasional Indonesia”

26. Surat Kabar Hikmah, Ahmad Yusuf, Minggu 3 Juli 1999, “KIPRAH UMAT: ICMI Kecolongan?”
27. Surat Kabar Hikmah, Sar, Minggu 1 Juni 1999, “SIYASAH: PSII Tidak Jagokan Habibie”
28. Surat Kabar Hikmah, BD, Minggu 1 Juni 1999, “SIYASAH: PBB Tidak Akan Bergabung dengan Golongan Sekuler”
29. Surat Kabar Hikmah, Evie, Minggu 1 Juni 1999, “SIYASAH: Umat Bisa Dorong Koalisi Parpol Islam”
30. Surat Kabar Hikmah, Minggu 1 Juni 1999, “Topik Utama: Parpol Islam Beraliansi”
31. Surat Kabar Hikmah, Minggu 1 Juni 1999, “Topik Utama: Kesepakatan Bersama Partai-Partai Politik Islam Jawa Barat”
32. Surat Kabar Hikmah, Minggu 1 Juni 1999, “Topik Utama: Menuju Koalisi Partai Islam”
33. Surat Kabar Hikmah, Minggu 1 Juni 1999, “KIPRAH UMAT: Haram Pilih Caleg Non- Muslim”
34. Surat Kabar Hikmah, Minggu 1 Juni 1999, “Topik Utama: Komunike untuk Luruskan Jalan Reformasi”
35. Surat Kabar Hikmah, Minggu 11 Juli 1999, “Kebebasan Pers Disalahgunakan”

b) Sumber Foto

Sumber foto yang didapat oleh penulis mengenai Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Tabloid Hikmah, di antaranya:

1. Foto Surat Kabar Pikiran Rakyat
2. Foto Tabloid Hikmah

Dalam melakukan pencarian sumber tentang Pemilu Indonesia Tahun 1999 dalam Pemberitaan Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Tabloid Hikmah, telah mencari dan menemukan sumber primer yang dapat dijadikan sumber sejarah. Sumber primer yang didapat yaitu berupa sumber, tulisan, benda dan visual.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan jenis sumber sejarah yang berasal dari orang atau pihak yang tidak secara langsung mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa, tetapi memperoleh informasinya dari sumber primer. Dengan kata lain, sumber sekunder merupakan hasil dari interpretasi, analisis, atau sintesis terhadap sumber-sumber primer oleh pihak lain.³¹Oleh karena itu, sumber sekunder bersifat pelengkap dan digunakan untuk memperkuat serta memperkaya analisis dalam penulisan Sejarah.

Sumber sekunder umumnya berupa karya ilmiah seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, dan publikasi lain yang disusun oleh para peneliti atau sejarawan berdasarkan data dan dokumen masa lampau.³² Meskipun tidak berasal langsung dari masa kejadian, sumber sekunder memiliki peranan penting dalam memberikan konteks, membandingkan perspektif, serta menilai ulang informasi yang terkandung dalam sumber primer.

Dalam penelitian ini sumber sekunder yang digunakan oleh penulis berasal dari berbagai instansi perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Pusat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Perpustakaan Dispusipda Jawa Barat, Jurnal serta dari beberapa koleksi literatur pribadi yang dimiliki oleh penulis. Diantara sumber-sumber sekundernya ialah sebagai berikut:

a) Sumber Tertulis

Sumber tertulis yang digunakan sebagai rujukan oleh penulis ialah beberapa skripsi, jurnal, dan buku yang membahas mengenai Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Tabloid Hikmah.

2. Kritik

Verifikasi atau Kritik Sumber Sejarah merupakan tahap lanjutan setelah proses heuristik dalam metodologi penelitian sejarah. Kritik sumber adalah

³¹ Kuntowijoyo, 105.

³² Sulasman, 72.

proses analisis yang bertujuan untuk menilai keabsahan, keandalan, dan kredibilitas dari sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan. Melalui kritik inilah seorang sejarawan dapat memilah dan memilih sumber yang layak dijadikan rujukan utama dalam penulisan sejarah.³³

Menurut Kuntowijoyo, kritik sumber dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal berfungsi untuk menilai keaslian (autentisitas) suatu dokumen atau sumber, misalnya dengan cara mengecek kondisi fisik sumber, asal-usul penerbitan, tanggal terbit, dan apakah sumber tersebut benar berasal dari masa yang dikaji. Sedangkan kritik internal menyangkut isi atau substansi sumber, termasuk memeriksa kebenaran informasi, bias penulis, sudut pandang ideologis, serta akurasi fakta sejarah yang disampaikan.³⁴

Dalam konteks penelitian ini, setelah melalui proses heuristik yang menyeluruh, penulis melakukan uji kredibilitas terhadap sumber-sumber seperti edisi cetak Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Tabloid Hikmah tahun 1999. Melalui kritik eksternal, penulis memeriksa keaslian fisik dan tanggal terbit setiap edisi, serta mengidentifikasi penulis berita atau editorial untuk memastikan konteks peliputan. Kemudian pada tahap kritik internal, dilakukan analisis terhadap isi pemberitaan, narasi politik yang dibangun, serta objektivitas atau bias yang mungkin mempengaruhi penulisan artikel.

Dengan tahapan verifikasi ini, sumber-sumber yang dikumpulkan semakin kuat untuk dijadikan acuan utama dalam menulis sejarah tentang peran surat kabar dalam Pemilu 1999. Validitas dan keandalan sumber menjadi landasan penting dalam menjamin kualitas penelitian sejarah yang berbasis bukti.

³³ Louis Gottschalk, 63.

³⁴ Kuntowijoyo, 98–102.

a) Kritik Ekstern

1. Sumber Tertulis

- a) Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 05), “Arena KAMPANYE: Sandaran Gerak Perjuangan PSII”. Surat kabar ini di terbitkan langsung oleh penerbit Pikiran Rakyat. Cover buku ini masih cukup baik namun perlu ke hati-hatian karena rentan rusak dengan kertas berwarna hitam putih. Namun dari tulisan masih terbaca rapi.
- b) Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 05), “Laskat Megawati Merahkan Bandung”. Surat kabar ini di terbitkan langsung oleh penerbit Pikiran Rakyat. Cover surat kabar ini masih cukup baik namun perlu ke hati-hatian karena rentan rusak dengan kertas berwarna hitam putih. Namun dari tulisan masih terbaca rapi.
- c) Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 05), “Arena KAMPANYE: PNI Jabar Mendukung Ali Sadikin Sebagai Capres”. Surat kabar ini di terbitkan langsung oleh penerbit Pikiran Rakyat. Cover surat kabar ini masih cukup baik namun perlu ke hati-hatian karena rentan rusak dengan kertas berwarna hitam putih. Namun dari tulisan masih terbaca rapi.
- d) Surat Kabar Hikmah, Ahmad Yusuf, Minggu 3 Juli 1999, “KIPRAH UMAT: ICMI Kecolongan?”. Surat kabar ini di terbitkan langsung oleh penerbit Pikiran Hikmah. Cover surat kabar ini masih cukup baik namun perlu ke hati-hatian karena rentan rusak dengan kertas berwarna hitam putih. Namun dari tulisan masih terbaca rapi.
- e) Surat Kabar Hikmah, Sar, Minggu 1 Juni 1999, “SIYASAH: PSII Tidak Jagokan Habibie”. Surat kabar ini di terbitkan langsung

oleh penerbit Pikiran Hikmah. Cover surat kabar ini masih cukup baik namun perlu ke hati-hatian karena rentan rusak dengan kertas berwarna hitam putih. Namun dari tulisan masih terbaca rapi.

b) Kritik Intern

1. Sumber Tertulis

- a) Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 05), “Arena KAMPANYE: Sandaran Gerak Perjuangan PSII”.

Jika ditinjau dalam kritik intern, Surat Kabar Pikiran Rakyat yang diterbitkan Bandung-minggu (PON) 23 Mei 1999 ini menjelaskan mengenai beberapa tokoh yang menyampaikan aspirasi berupa kampanye, yang mengajak para hadirin baik anggota Bai’at maupun simpatisan untuk bahu membahu bersama PSII mencapai kejayaan islam dan kaum muslimin. Dengan adanya penjelasan mengenai kampanye pada saat pemilu tahun 1999, penulis merasa yakin menjadikan surat kabar ini yang diterbitkan langsung oleh Pikiran Rakyat pada saat situasi kampanye pemilu pada tahun 1999. Yang dapat melengkapi sumber – sumber penelitian ini.

- b) Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 05), “ Arena KAMPANYE: Laskat Megawati Merahkan Bandung”.

Jika ditinjau dalam kritik intern, surat kabar tersebut menggambarkan situasi iring-iringan kampanye massa PDI Perjuangan. Awal dari kegiatan kampanye putaran pertama untuk tingkat Kotamadya Bandung, lokasi kampanye di GOR Pajajaran. Dengan juru kampanye Ketua DPR RI Perjuangan Bung Manggara Siahaan Caleg DPR RI daerah pemilihan Kotamadyan Bandung, didampingi Fungsiaris DPD Jabar

Drs. Endang Karman, dan Sekretaris DPC Kotamadya Bandung Ir. Ketut Sustiawan. Dihadapan sekitar 30.000 massa kader PDI Perjuangan. Jika dilihat dari situasi tersebut, surat kabar ini sudah semestinya layak untuk dijadikan sebagai sumber penelitian yang dilakukan oleh penulis.

- c) Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 05), “Arena KAMPANYE: PNI Jabar Mendukung Ali Sadikin Sebagai Capres”.

Dalam surat kabar ini mengemukakan calon presiden pada Rapim Nasional yang akan diselenggarakan setelah pemilu. Sebelumnya beberapa nama telah muncul dan yang paling menonjol adalah calon yang diajukan oleh DPD PNI Jawa Barat. Hal ini dimajukan setelah jajak pendapat semua Dewan Pimpinan Cabang se Jawa Barat mendukung sebuah nama, yaitu Ali Sadikin. Wijnarko SH yang dikenal sebagai tokoh GMNI Jawa Timur mengungkapkan "*Dukungan untuk Ali Sadikin oleh DPD lainnya cukup bagus, karena telah didukung oleh DPD potensial lainnya, antara lain DPD PNI DKI Jaya, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara. Kalimantan Barat Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dll. Mudah-mudahan pencalonan Ali Sadikin dapat mulus disetujui DPP PNI*".

Maka penulis merasa yakin untuk menjadikan surat kabar yang berjudul “Arena KAMPANYE: PNI Jabar Mendukung Ali Sadikin Sebagai Capres” sebagai sumber dalam penelitian yang penulis lakukan.

- d) Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 05), “Arena KAMPANYE: PIB Berikan Kredit Tanpa Bunga Bagi Pengusaha Kecil”.

Jika ditinjau dalam kritik intern, surat kabar tersebut menjelaskan partai yang lahir era reformasi yang telah menyusun program andalannya berupa bidang politik dan bidang ekonomi. Maka penulis merasa yakin untuk mejadikan surat kabar ini sebgai sumber dalam penelitian yang penulis lakukan.

- e) Surat Kabar Pikiran Rakyat, Bandung-Minggu (PON) 23 Mei 1999, (Nomor 05), “Arena KAMPANYE: “Tanpa Bolo, Tanpa Ngesurake” Padi Perjuangkan Kedaulatan Rakyat”.

Jika ditinjau dalam kritik intern, surat kabar tersebut menjelaskan bagaimna berdirinya parta PADI, yang merupakan tindak lanjut dari gerakan reformasi yang diperoleh mahasiswa. Bersymbolakn dua tangkai padi dan setangkap kapas pada lambang PADI berwarna putih dengan latar belakang merah, menunjukkan bahwa partai yang bemomor urut empat untuk Pemilu 7 Juni 1999. Surat kabar ini dapat dipercaya dan di pertanggung jawabkan keasliannya, sebab surat kabar ini merupakan pemberitaaan yang diterbitkan langsung oleh Surat Kabar Pikiran Rakyat pada saat situasi kampanye pada tahun 1999.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan ketiga dalam metode penelitian sejarah, yang memegang peranan penting dalam proses penulisan sejarah. Pada tahap ini, seorang sejarawan tidak hanya bertugas memaparkan fakta, melainkan juga memberikan makna terhadap fakta-fakta tersebut berdasarkan pemahaman yang mendalam atas konteksnya. Interpretasi melibatkan upaya untuk menyatukan berbagai data yang telah diperoleh dalam tahap heuristik dan diverifikasi melalui kritik sumber, lalu menyusunnya menjadi sebuah narasi yang logis, utuh, dan bermakna.

Menurut Kuntowijoyo, interpretasi bukanlah sekadar proses rasional analitis, tetapi juga melibatkan daya imajinasi ilmiah. Imajinasi ini bukan

berarti khayalan, melainkan kemampuan untuk membayangkan situasi historis secara kontekstual agar dapat menyusun hubungan sebab akibat dan dinamika sosial yang terjadi pada masa lalu.³⁵ Hal ini penting agar sejarawan dapat menghasilkan sintesis sejarah yang objektif dan tidak semata-mata bersifat deskriptif.

Dengan interpretasi yang tepat, sejarawan dapat menghindari kesalahan dalam menafsirkan sumber, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Oleh karena itu, interpretasi merupakan jembatan penting antara data sejarah dan historiografi yang bersifat naratif dan analitis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Framing yang dikemukakan oleh Robert Entman. Teori ini merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam kajian komunikasi dan media untuk menganalisis bagaimana informasi disusun dan ditampilkan oleh media massa sehingga memengaruhi cara audiens memahami suatu isu. Menurut Entman, *framing* melibatkan dua proses utama: seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari realitas.³⁶ Artinya, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memilih aspek mana dari realitas yang ingin ditonjolkan untuk membentuk makna tertentu dalam benak khalayak.

Entman mengidentifikasi empat elemen utama dalam praktik framing, yaitu: (1) *defining problems* (mendefinisikan masalah), (2) *diagnosing causes* (mendiagnosis penyebab), (3) *making moral judgments* (membuat penilaian moral), dan (4) *suggesting remedies* (menyajikan solusi).³⁷ Keempat elemen ini bekerja secara simultan dalam setiap narasi pemberitaan, menciptakan bingkai (frame) yang mengarahkan cara pembaca memahami isu tertentu, apakah sebagai masalah struktural, moral, atau politis.

³⁵ Kuntowijoyo, 100.

³⁶ Robert M. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm," *Journal of Communication* 43, no. 4 (1993): 52.

³⁷ Robert M. Entman, 52-54.

Dengan demikian, teori ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis pemberitaan surat kabar Pikiran Rakyat dan Hikmah dalam konteks Pemilu 1999. Penulis menggunakan kerangka ini untuk mengamati bagaimana kedua media membingkai isu politik, partai peserta pemilu, serta proses demokrasi yang tengah berkembang pada masa transisi pasca-Orde Baru.

Selama periode Orde Lama (1945–1965), kebebasan pers di Indonesia mengalami sedikit kemajuan dibandingkan masa kolonial. Namun, kebebasan tersebut tetap berada dalam pengaruh kuat kekuasaan politik yang terpusat. Di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, media massa sebagian besar diarahkan untuk mendukung kebijakan negara, khususnya dalam menyosialisasikan dan memperkuat ideologi NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Kebijakan ini secara tidak langsung menempatkan media dalam posisi subordinat terhadap negara, sehingga fungsi pers sebagai sarana kritik dan pengawasan terhadap kekuasaan menjadi terbatas.³⁸

Meskipun secara kuantitas jumlah surat kabar yang beredar meningkat, sebagian besar di antaranya digunakan sebagai alat propaganda pemerintah. Kebijakan pers yang bersifat koersif ini membuat ruang publik menjadi sempit dan menekan kebebasan berekspresi serta pluralitas suara dalam wacana nasional. Kritik terhadap pemerintah dibatasi, dan media yang dianggap menyimpang dari arah politik negara berisiko mengalami pembredelan.³⁹

Setelah terjadinya peralihan kekuasaan pada tahun 1966 dan dimulainya era Orde Baru, kondisi kebebasan pers justru mengalami kemunduran yang lebih tajam. Rezim Soeharto menerapkan kontrol ketat terhadap media dengan pemberlakuan sistem Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang menjadi instrumen politik untuk mengawasi dan membungkam kritik. Dalam suasana politik yang represif ini, media massa kembali kehilangan peran

³⁸ Krishna Sen dan David T. Hill, *Media, Culture and Politics in Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 45–47.

³⁹ Romli Atmasasmita, *Kebebasan Pers dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), 22.

kritisnya sebagai pilar demokrasi dan hanya difungsikan sebagai alat legitimasi kekuasaan negara.⁴⁰

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pengawasan terhadap media dilakukan secara ketat melalui berbagai regulasi formal dan informal. Salah satu bentuk kontrol tersebut adalah penerapan Surat Izin Terbit (SIT),⁴¹ yang menjadi syarat mutlak bagi media untuk dapat terbit secara legal. Kebijakan ini digunakan sebagai alat untuk membatasi ruang gerak media dan membungkam kritik terhadap pemerintah. Media yang dianggap menyuarakan opini berseberangan dengan pemerintah sering kali mengalami pembredelan. Contohnya adalah pembredelan Majalah Tempo dan Harian Sinar Harapan, yang diberhentikan karena dianggap melaporkan isu-isu yang "mengganggu stabilitas nasional". Pemerintah juga membentuk Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS)⁴² sebagai instrumen untuk mengawasi isi pemberitaan dan menjamin bahwa media hanya menyampaikan informasi yang tidak merugikan citra pemerintah. Dalam situasi ini, kebebasan jurnalis sangat tertekan, di mana banyak di antara mereka mengalami intimidasi ketika mencoba mengangkat isu-isu sensitif.⁴³

Setelah reformasi pada tahun 1998, kebebasan pers di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Reformasi yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan membuka jalan bagi kebebasan pers yang lebih besar. Pengesahan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi landasan penting dalam menjamin kemerdekaan pers di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak-hak pers dan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, mendorong

⁴⁰ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2008), 134.

⁴¹ Surat Izin Terbit (SIT) merupakan salah satu bentuk regulasi pemerintah Orde Baru untuk mengontrol media cetak. Media yang tidak memiliki SIT tidak diizinkan terbit, dan izin ini dapat dicabut sewaktu-waktu.

⁴² Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) adalah organisasi yang menghimpun perusahaan penerbit pers di Indonesia. SPS didirikan pada tahun 1946 dan berperan dalam membela kebebasan pers serta meningkatkan profesionalisme industri media.

⁴³ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia: A Political Biography* (Jakarta: Equinox Publishing, 2007), 58–60.

independensi redaksional, serta menghapuskan praktik pengawasan ketat yang sebelumnya dilakukan pemerintah. Dengan adanya regulasi ini, media memperoleh kebebasan yang lebih luas dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, pendidikan publik, dan partisipasi politik, termasuk dalam momentum penting seperti Pemilu 1999 yang menjadi tonggak awal demokrasi pascareformasi.⁴⁴

Pasca Reformasi 1998, media di Indonesia mulai menunjukkan keberaniannya dalam mengkritik kebijakan pemerintah dan menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat. Perubahan ini tidak hanya ditandai oleh meningkatnya kebebasan berekspresi, tetapi juga dengan munculnya berbagai media baru, baik dalam bentuk cetak maupun daring, yang menyediakan ragam informasi yang lebih luas dan representatif bagi publik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa media mulai berfungsi secara lebih optimal sebagai saluran komunikasi politik dan sosial yang dinamis. Namun demikian, peningkatan kebebasan ini tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Masih terdapat berbagai bentuk tekanan, seperti intimidasi terhadap jurnalis, kekerasan fisik, kriminalisasi, serta intervensi politik dan kepentingan pemilik modal yang dapat memengaruhi independensi redaksional media.⁴⁵

Pemilu yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1999 merupakan momen krusial dalam perjalanan demokrasi bangsa, sekaligus menandai babak baru pasca-runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Diselenggarakan pada 7 Juni 1999, pemilu ini menjadi yang pertama dalam era Reformasi dan diikuti oleh 48 partai politik, mencerminkan terbukanya ruang politik yang sebelumnya dibatasi oleh sistem otoriter. Dalam konteks ini, media massa memainkan peran yang sangat signifikan. Setelah mengalami pembungkaman

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887.

⁴⁵ David T. Hill dan Krishna Sen, *Media, Culture and Politics in Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 215–217.

selama tiga dekade di bawah rezim Orde Baru, pers Indonesia memperoleh kebebasan yang lebih luas dalam masa Reformasi.⁴⁶

Kebebasan ini memungkinkan media untuk menjalankan fungsinya sebagai penyedia informasi politik yang kredibel, termasuk menyajikan profil partai politik, rekam jejak kandidat, serta dinamika kampanye. Selain itu, media juga berfungsi sebagai kanal pendidikan politik dan forum diskusi publik yang terbuka.⁴⁷ Dalam hal ini, peran pers sebagai *the fourth estate* menjadi sangat terasa, karena media turut serta dalam menjaga transparansi, mendorong partisipasi warga, dan mengawasi jalannya proses demokrasi.⁴⁸ Secara keseluruhan, Pemilu 1999 tidak hanya menjadi arena kontestasi politik, tetapi juga momentum kebangkitan pers sebagai institusi sosial yang berperan penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia.

Media massa, termasuk surat kabar, memiliki kekuatan besar dalam membentuk realitas sosial melalui proses *framing*. Dalam konteks pemilu, surat kabar tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memilih aspek-aspek tertentu dari isu politik untuk disorot, yang pada gilirannya membentuk cara pandang publik terhadap pemilu tersebut. Proses ini secara langsung memengaruhi persepsi masyarakat terhadap aktor-aktor politik, kebijakan, serta nilai-nilai yang mendasari pilihan politik mereka.⁴⁹

Sebagai contoh, jika Pikiran Rakyat lebih menitikberatkan pemberitaannya pada tokoh-tokoh politik nasional, jalannya kampanye, dan dinamika antarpantai, maka surat kabar ini cenderung mbingkai pemilu sebagai proses politik prosedural dan rasional. Di sisi lain, Hikmah menampilkan pemberitaan yang menekankan pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik, serta menyoroti aspek moralitas calon dan program partai Islam. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan dua jenis framing yang

⁴⁶ David T. Hill dan Krishna Sen, 205.

⁴⁷ Agus Sudibyo, *Demokrasi dan Media Massa* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 117.

⁴⁸ David T. Hill, 237.

⁴⁹ Robert M. Entman, 51–58.

berbeda: satu berbasis analisis politik objektif, dan satu lagi berbasis perspektif ideologis dan normatif.⁵⁰

Pembaca Pikiran Rakyat dan Hikmah akan menerima narasi yang berbeda tentang realitas politik yang sama. Ini menunjukkan bahwa framing media tidak hanya mempengaruhi isi informasi yang dikonsumsi publik, tetapi juga membentuk opini politik mereka secara lebih mendalam.

Berdasarkan realitas inilah, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam **Gambaran Pemilu Tahun 1999 dalam Pemberitaan Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Tabloid Hikmah**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang peran media dalam masa transisi demokrasi, serta menunjukkan bagaimana pendekatan pemberitaan yang berbeda dapat mempengaruhi persepsi publik secara luas.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dalam metode penelitian sejarah yang mencakup penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang utuh dan sistematis. Secara etimologis, istilah *historiografi* berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *historia* yang berarti “sejarah”, dan *graphein* yang berarti “menulis”. Dengan demikian, historiografi secara harfiah berarti “penulisan sejarah”.⁵¹

Dalam konteks ilmu sejarah, historiografi tidak hanya dimaknai sebagai proses menulis sejarah semata, tetapi juga mencakup analisis terhadap cara sejarah ditulis dan disusun oleh para sejarawan. Hal ini mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang perspektif yang digunakan, sumber-sumber yang diandalkan, serta bagaimana narasi tersebut dibentuk. Dengan demikian, historiografi berfungsi sebagai alat untuk memahami bagaimana suatu peristiwa sejarah direkonstruksi dan bagaimana konstruksi tersebut

⁵⁰ Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, 6th ed. (London: Sage Publications, 2010), 378–381.

⁵¹ Kuntowijoyo, 89.